

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk berbudaya. Semua pola tingkah laku, tata cara dan sikap hidup manusia berasal dari perspektif budaya. Budaya yang membentuk kepribadian seorang manusia. Budaya pula yang memberi identitas diri, sehingga dapat membedakannya dari yang lain. Karena itu, manusia pada dasarnya lebih merupakan makhluk kultural daripada natural. Pada saat kelahiran, alam memberikan kepadanya secara minimum hal-hal esensial untuk menjadi manusia dan memberinya tugas untuk membentuk dirinya demi perwujudan dirinya melalui kebudayaan.¹ Kebudayaan itu sungguh memperlihatkan seluruh kepribadian dan karakter seorang manusia. Karena itu, kebudayaan dapat dilihat sebagai jendela yang sudah dibuka untuk memahami misteri manusia. Kebudayaan, sesuai dengan arti katanya, adalah hasil ciptaan dan tempaan manusia (otak dan budi). Dengan demikian, sesungguhnya manusia lebih dilihat sebagai makhluk kultural ketimbang makhluk natural.²

Sebagai makhluk kultural, manusia sesungguhnya mempunyai 2 (dua) arti utama, yaitu; manusia sebagai hasil produk budaya dan manusia sebagai penerima pertama dan akibat atau hasil terbesar dari kebudayaan.³ Artinya bahwa semua dinamika dan seluk beluk hidup manusia merupakan hasil tempaan budaya. Budaya yang mengambil peranan dalam hidup manusia. Budaya pula yang mengarahkan paradigma dan otoritas hidup manusia. Dengan demikian, manusia sebagai hasil produk budaya yang pertama dan terakhir menerima segala bentuk konsekuensi dari budaya tersebut.

¹Konrad Kebung, *Filsafat Berpikir Orang Timur* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011), hal. 244

²*Ibid*, hal. 245

³*Ibid*, hal. 243

Segala bentuk konsekuensi tersebut dapat dilihat dalam realitas sosial, yang menunjukkan bahwa pola pikir dan pola tingkah laku seseorang selalu bertautan dengan budaya setempat. Setiap himpunan atau kelompok masyarakat selalu menampilkan eksistensi dan esensi dari budaya yang dianut. Singkatnya, budaya yang membentuk kepribadian manusia. Karena itu, sebagai bagian dari konsekuensi budaya, maka fenomena budaya yang paling rentan diperbincangkan, bahkan sedang diperjuangkan di tengah masyarakat, yaitu mengenai dominasi fenomena budaya yang mensubordinasikan kaum perempuan.

Inilah Anggapan umum yang berlaku sekarang ini tentang kedudukan kaum perempuan yang lebih rendah daripada laki-laki dalam masyarakat tercermin dalam prasangka-prasangka umum, seperti "seorang istri harus melayani suami", "perempuan itu turut ke surga atau ke neraka bersama suaminya", dan lain-lain. Prasangka-prasangka ini mendapat penguatan dari struktur moral masyarakat yang terwujud dalam peraturan-peraturan agama dan adat. Lagipula, sepanjang ingatan kita, bahkan nenek moyang kita, keadaannya memang sudah begini.

Berbicara mengenai kaum perempuan, secara langsung mengarahkan paradigma bahwa kaum perempuan adalah kaum yang lemah dan tidak dapat berdiri sendiri secara otonom. Dalam kehidupan bermasyarakat, perjuangan kaum perempuan untuk menduduki tingkat kesetaraan dengan laki-laki sudah sangat familiar dan perjuangan kesetaraan sosial tersebut merupakan tema yang menarik yang terus menerus diangkat dan didiskusikan dalam era modernitas dewasa ini. Perjuangan perempuan demikian berpijak pada anggapan bahwa perempuan dan laki-laki harus diperlakukan secara adil dalam setiap aspek kehidupan, khususnya sosial dan budaya. Gerakan ini yang sering kali disebut 'isu gender' memperjuangkan kesetaraan sosial antara perempuan dan laki-laki yang dilakukan oleh kaum perempuan dan juga oleh kaum laki-laki.

Di atas kita dapat melihat bahwa penempatan perempuan pada posisi kelas 2 (dua) dalam masyarakat berawal dari tergesernya peranan kaum perempuan dalam lapangan produksi. Pada gilirannya, tergesernya peran ini adalah akibat dari tingkatan teknologi masa itu yang tidak memungkinkan kaum perempuan untuk memasuki lapangan produksi.

Posisi kelas 2 (dua) ini diperkukuh oleh sistem kepemilikan pribadi, yang pada gilirannya memunculkan diri dalam berbagai prasangka, sistem nilai dan ideologi yang menegaskan paham keunggulan laki-laki dari perempuan.

Karena ketertindasan perempuan berawal dari sebuah perjalanan sejarah yang objektif, maka upaya pembebasan perempuan dari posisi yang ditempatinya sekarang ini harus pula menemukan kondisi objektif yang memungkinkan dilakukannya pembebasan tersebut. Kondisi itu adalah kembalinya kaum perempuan ke lapangan produksi kolektif.

Kondisi ini sesungguhnya telah diwujudkan oleh kapitalisme. Kapitalisme, yang mengandalkan mesin sebagai alat produksinya yang utama, telah memungkinkan kaum perempuan untuk kembali berkarya di bidang produksi kebutuhan masyarakat. Bahkan, sekarang ini, jika kita melihat di kota-kota besar, sudah jarang sekali ada kaum perempuan yang tidak memberikan sumbangan bagi perolehan kebutuhan hidup keluarganya.

Lagipula, kapitalisme telah membuat sistem produksi menjadi semakin lama semakin kolektif. Hampir tiap barang yang kita pergunakan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari merupakan hasil kerja ratusan bahkan ribuan orang. Ini semua adalah pertanda bahwa sistem produksi komunal semakin hari semakin berjaya kembali.

Dapatlah kita lihat bahwa perkembangan kondisi objektif ini telah menghasilkan ruang yang sangat terbuka bagi perempuan. Gerakan emansipasi perempuan telah berkembang bersamaan dengan masuknya perempuan-perempuan ke pabrik-pabrik. Kini perempuan telah berhak turut serta dalam berbagai bidang pekerjaan. Kebanyakan

perempuan juga telah bebas untuk memilih jalan hidupnya sendiri, termasuk memilih pasangan hidup.

Namun demikian, kondisi objektif ini tidak dapat berkembang menjadi pembebasan perempuan yang sepenuh-penuhnya karena sistem nilai yang ada di tengah masyarakat masih merupakan sistem nilai yang mendukung adanya peminggiran terhadap peran perempuan.

Kita dapat melihat bahwa pekerja perempuan kebanyakan diupah jauh lebih rendah daripada pekerja laki-laki. Dan ini bukan terjadi di pabrik-pabrik saja. Demikian pula yang terjadi di banyak kantor-kantor, bahkan di kalangan industri perfilman di mana aktris biasanya digaji lebih rendah daripada aktor.

Masih dalam bidang pekerjaan, kita tahu bahwa bidang-bidang tertentu masih diposisikan sebagai "bidangnya perempuan". Seorang sekretaris, misalnya, haruslah cantik dan memiliki bentuk tubuh yang "menarik". Banyak orang masih meremehkan seorang perempuan yang bercita-cita dan berusaha keras untuk, misalnya, menjadi seorang pilot.

Ini berkaitan erat dengan masih dijadikannya perempuan sebagai simbol seksual dalam masyarakat. Penilaian utama terhadap seorang perempuan diletakkan pada apakah ia "cantik", "seksi" atau bentuk-bentuk penilaian fisik lainnya. Sesungguhnya, penilaian inipun sangat bergantung pada masyarakatnya karena apa yang "cantik dan seksi" untuk satu jaman belum tentu demikian untuk jaman lainnya. Dan pada titik ekstrimnya, kita melihat pelacuran sebagai bentuk eksploitasi puncak terhadap perempuan karena di sini bukan saja tenaganya yang dieksploitasi melainkan juga moral dan intelektualitasnya.

Di tengah masyarakat kita telah pula berkembang gerakan anti-emansipasi perempuan. Banyak bentuk yang diambil oleh gerakan ini, namun pada intinya gerakan ini berusaha mengembalikan posisi perempuan menjadi posisi terpinggirkan. Perempuan

hendak dikembalikan pada posisi tidak turut dalam pengambilan keputusan, bahkan hendak dibatasi kembali ruang gerakanya.

Sebaliknya, banyak pula dari kaum perempuan yang telah lolos dari jerat pembatasan-pembatasan, ternyata justru berbalik ikut membatasi gerak, bahkan turut menindas, kaum perempuan lainnya. Telah banyak pemimpin perempuan di muka bumi ini, tapi berapa banyak dari mereka yang berjuang untuk membebaskan kaum perempuan dari keterpinggiran dan keterbelakangan? Telah banyak pula manajer dan direktur perempuan di dalam perusahaan-perusahaan, tapi berapa banyak dari mereka yang berjuang agar buruh-buruh perempuan di pabriknya mendapatkan seluruh hak mereka sebagai perempuan?

Kajian tentang ketidakadilan gender juga merupakan satu tema penting lain yang sering muncul di permukaan kehidupan sosial dan budaya. Dalam kehidupan suatu masyarakat, ketidakadilan gender sering dipandang sebagai dampak negatif langsung dari budaya patriarkat. Masyarakat yang berbudaya patriarkat dianggap sebagai biang keladi terjadinya malapetaka bagi kaum perempuan. Hal ini terjadi karena ada anggapan bahwa dalam budaya patriarkat, kaum laki-laki dianggap sebagai kepala untuk semua urusan. Oleh karena itu, budaya patriarkat beserta segala nilai dan produk-produknya mesti dimurnikan demi sebuah kesetaraan martabat.

Akan tetapi pada pihak lain, kecenderungan mengkambinghitamkan manusia dan budaya tidak saja terjadi pada masyarakat yang bersistem patriarkat, tetapi juga pada masyarakat yang bersistem matriarkat. Dalam budaya matriarkat, peran dan status kaum laki-laki kurang diperhitungkan (terutama dalam hal yang berkaitan dengan adat istiadat). Masyarakat yang menganut budaya matriarkat menganggap laki-laki sebagai kelompok yang tergolong dalam kelas rendah (kelas dua).

Berdasarkan fenomena pengaruh budaya patriarkat dan matriarkat di atas, dapat penulis katakan bahwa setiap masyarakat pemangku budaya tertentu selalu berhadapan dengan beberapa kecenderungan yang bersifat destruktif (negatif). Maksud dari kecenderungan negatif yaitu bahwa setiap masyarakat pemilik budaya tertentu cenderung mengabaikan nilai-nilai luhur budaya yang sesungguhnya bersifat mempersatukan kelompok-kelompok dan bukan mengabaikan pihak tertentu. Penyelewengan nilai luhur budaya ini nampak dalam aneka praktek budaya yang kerap dimanipulasi secara ekonomis dan politis. Dalam hal ini, praktek belis (mas kawin) dalam adat perkawinan. Adat belis adalah salah satu bagian dari budaya yang sering melahirkan aneka *problem* lain. Aneka *problem* itu muncul karena belis disalahartikan. Belis bukan lagi bernilai budaya melainkan bergeser ke arah komersial dan ekonomis. Oleh karena pengaruh budaya, belis juga mengarahkan paradigma salah satu pihak untuk bertindak sewenang-wenang dan menyudutkan atau mensubordinasikan pihak lain. Lantas harga diri pihak tertentu itu telah di beli dengan harga belis. Disinilah sumber terjadinya konflik sosial dalam masyarakat, karena pihak tertentu dirugikan serta diabaikan dalam peran sosial tertentu.

Karena itu, sesungguhnya pihak-pihak yang dirugikan atau dinomorduakan bersumber pada budaya yang dianut. Cara pandang budaya yang menyebabkan adanya perbedaan hak pada setiap manusia. Pada hal hakikat hak bersifat universal dan setara (*equal*). Seseorang atau manusia mempunyai hak yang sama seperti yang dipunyai orang lain. Hak untuk memperoleh keadilan atau hak tidak mendapat tingkat subordinasi dalam lingkungan sosial sesungguhnya setara, sebab suatu hak asasi manusia tidak boleh dikacaukan dengan nilai-nilai atau aspirasi-aspirasi yang menggarisbawahinya, atau dengan kenikmatan atas objek hak tertentu.⁴ Kesetaraan tersebut bila ditilik dari sumbernya maka memiliki tingkat atau kedudukan yang sama. Tingkat atau kedudukan

⁴Frans Ceunfin, *Hak-Hak Asasi Manusia* (Maumere: Ledalero, 2004), hal. 6-7.

yang sama itu bersumber dari pandangan bahwa semua manusia tanpa dibedakan adalah diciptakan dengan kedudukan yang sama, yaitu sebagai makhluk mulia dan tinggi derajatnya dibandingkan dengan makhluk lain. Dihadapan Tuhan manusia adalah sederajat kedudukannya atau tingkatannya. Yang membedakan nantinya adalah tingkatan ketakwaan manusia tersebut terhadap Tuhan.⁵

Kendati demikian, rigiditas dan cara pandang manusia masih tetap didominasi oleh nilai dan hakikat masing-masing budaya. Dalam budaya masyarakat Tana Ai, khususnya masyarakat Boganatar dikenal adat *wuataa* (sirih pinang). Adat *wuataa* (berupa belis/mas kawin) ini, bila dibandingkan dengan adat belis dalam budaya-budaya patriarkat/patrilineal, maka jumlahnya sangat sedikit dan sederhana atau dapat dikatakan ‘tidak ada belis’ namun mempunyai nilai dan makna yang sarat dan mendalam. *Wua taa* sebagai salah satu kaidah normatif atau hukum adat yang turut mengatur proses perkawinan dalam hidup bermasyarakat. *Wuataa* menjadi norma dan pegangan dasar yang bersifat mengikat, wajib, berlaku universal serta meneguhkan kehidupan masyarakat. Dalam perkawinan yang ditandai dengan pembentukan keluarga baru sering terjadi kesalahan-kesalahan yang diakibatkan oleh kurangnya saling pengertian antara suami-istri. Suami tidak mengerti istrinya atau sebaliknya istri tidak mengerti suaminya. Maka, tidak mengherankan jika dewasa ini muncul berbagai tindakan kekerasan dalam keluarga. Karena itu, yang menjadi korban ialah perempuan, terutamadalam masyarakat dengan sistem perkawinan patriarkat/patrilineal. Sementara itu, ada banyak laki-laki yang menjadi korban kekerasan dari pihak perempuan dalam masyarakat dengan sistem perkawinan matriarkat/matrilineal.

⁵Muhammad Syukri Albani Nasution, dkk., *Ilmu Sosial Budaya Dasar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hal. 95

Dalam budaya matrilineal, khususnya budaya matrilineal masyarakat Boganatar, perempuan memiliki peran yang cukup dominan. Pada budaya matrilineal di Boganatar, selain semua keturunan atau anak-anak mengikuti garis ibu/istri, perempuan berhak atas warisan atau harta milik dan mempunyai hak dalam berbicara dan menentukan suatu keputusan. Hal ini sangat nampak apabila suami berasal dari budaya patrilineal. Ia tentunya dituntut untuk meninggalkan orangtuanya dan bersatu dengan istrinya. Pada tempat ini, ia dituntut pula untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri terhadap lingkungan istri, di mana ia harus meninggalkan otoritasnya sebagaimana yang berlaku di budayanya.

Lain halnya dengan suami yang berasal dari Boganatar. Suami yang berasal dari budaya matrilineal di Boganatar, memang dituntut untuk meninggalkan orangtuanya dan bersatu dengan istrinya, namun ia tetap mempunyai hak untuk berbicara dan hak atas hal-hal lainnya. Otoritanya berperan ganda, yakni di tempat kediaman keluarganya dan di tempat kediaman sang istri. Disinilah letak perbedaan antara suami yang berasal dari budaya patrilineal dan suami dari budaya matrilineal Boganatar.

Kendati demikian, tetap saja kaum laki-laki dalam budaya matrilineal masyarakat Boganatar mendapat kedudukan lebih rendah (disubordinasi) oleh kaum perempuan. Sekalipun suami berperan sebagai kepala keluarga, namun peran dan fungsi tersebut dibatasi. Batasan yang dimaksud ialah ia tak sepenuhnya mengekspresikan serta melakukan hak dan otoritasnya sebagaimana yang umumnya terjadi dalam budaya-budaya patrilineal/patriarkat, melainkan semua kehendak dan tindakannya tersebut dikoordinasi atau harus mendapat legitimasi sepenuhnya dari perempuan atau istri. Dalam kenyataan seperti ini, kelihatannya laki-laki atau suami tidak memiliki peran yang sentral dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Topik keberadaan laki-laki dalam budaya matrilineal menjadi topik yang menarik untuk didalami. Sudah pasti kebudayaan matrilineal akan membawa pengaruh terhadap relasi dan keberadaan kaum laki-laki. Pertanyaan muncul, dampak apakah yang timbul bagi keberadaan kaum laki-laki dalam budaya matrilineal? Untuk itu, penulis memilih untuk mendalami topik ini dengan judul tulisan, “**Sistem Matrilineal Orang Boganatar, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka**”

1.2. Rumusan Masalah

Untuk memperdalam masalah ini, maka penulis merumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep budaya orang Boganatar tentang perkawinan matrilineal?
2. Bagaimana posisi laki-laki dalam sistem matrilineal Boganatar (sebagai dampaknya) dan siapakah sesungguhnya perempuan itu?
3. Bagaimana peran perempuan dalam adat orang Boganatar

1.3. Tujuan Penulisan

Ada beberapa tujuan mendasar yang ingin dicapai penulis:

1. Mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan konsep budaya orang Boganatar tentang perkawinan matrilineal
2. Mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan posisi laki-laki dalam sistem matrilineal Boganatar dan sosok perempuan
3. Mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan peran perempuan dalam adat Boganatar

1.4. Manfaat Penulisan

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian terkait dengan sistem matrilineal belum banyak dilakukan. Dengan demikian, penelitian ini memfokuskan untuk menganalisis dan bermaksud merekonstruksi

teori dan konsep kebudayaan matrilineal yang mencoba memperkenalkan prinsip harkat dan martabat perempuan serta perkawinan adat matrilineal. Penelitian ini juga diharapkan mampu memperkuat tradisi ilmiah terkait dengan sistem matrilineal.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam menjalankan tugasnya, melalui penyempurnaan sistem matrilineal dan peningkatan pemahaman terhadap sistem matrilineal orang Boganatar dalam kehidupan sehari-hari.

2. Bagi Universitas dan Fakultas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan semangat bagi para mahasiswa untuk mengenal dan menggali nilai-nilai budaya asli yang ada di daerah masing-masing teristimewa mengenal dan memahami sistem matrilineal masyarakat Boganatar, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman terhadap khasanah keilmuan budaya matrilineal bagi penulis serta mengambil makna dan nilai positif di dalam perjalanan hidup penulis.

4. Bagi Masyarakat Boganatar

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran untuk membantu masyarakat Boganatar, khususnya para generasi muda agar mengenal secara baik dan mendalam terkait sistem matrilineal. Dengan demikian, diharapkan dapat mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

5. Bagi Gereja

Penulis ingin memberikan kontribusi bagi gereja, agar lebih memperhatikan persoalan-persoalan aktual di tengah umat. Juga bagi karya pastoral (tertahbis) agar tetap memperhatikan juga budaya setempat dan persoalannya. Maka penting, untuk memiliki pengetahuan yang memadai di tengah medan pastoral akan *problem-problem* pada umumnya, khususnya seperti *problem* perkawinan yang ditelaah dalam karya ini.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.⁶ Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2001:3) menyatakan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Dalam hubungannya dengan tujuan penelitian deskriptif,⁷ Masri Singarimbun (1987:4) berpendapat bahwa penelitian deskriptif mempunyai 2 (dua) tujuan, yaitu yang pertama untuk mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu atau frekuensi terjadinya suatu aspek fenomena sosial budaya tertentu. Tujuan kedua adalah untuk mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial budaya tertentu, umpamanya interaksi sosial, system perkawinan, sistem kerabatan dan lain-lain. Penelitian seperti ini biasanya dilakukan tanpa hipotesa yang telah dirumuskan secara ketat, adakalanya menggunakan hipotesa, tetapi bukan menguji secara statistik.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan gejala atau fenomena tertentu pada masa sekarang, kemudian menganalisa dan menafsirkan tentang hubungan-

⁶Lexy Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan Pertama. Bandung. Penerbit Remaja Karya

⁷ Masri Singarimbun. *Metodologi Penelitian*. Jakarta. Erlangga. 2016

hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dalam penelitian ini, fenomena yang akan diteliti dan diungkapkan adalah sistem matrilineal orang Boganatar, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur.

1.5.2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian kualitatif dibatasi dengan beberapa pertanyaan dasar yang telah dikemukakan sebelumnya, guna menemukan nilai edukatif dalam ritus perkawinan adat itu sendiri sebagai upacara perkawinan adat dalam masyarakat Boganatar.

1.5.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kampung Boganatar, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Pertimbangan untuk memilih lokasi dan unit budaya penelitian di tempat ini, sebagai berikut; *Pertama*: lokasi ini adalah lokasi di mana sasaran peneliti berdominsili. *Kedua*: peneliti memiliki akses untuk memperoleh data penelitian yang otentik karena peneliti dari garis keturunan ayah. *Ketiga*: lokasi ini merupakan tempat asal peneliti, sehingga peneliti memahami bahasa masyarakat setempat dengan baik.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian berlangsung selama 3 (tiga) minggu yakni minggu ke 1 dan minggu ke 2 Bulan September Tahun 2019.

1.5.4. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

a. Data Kualitatif

Menurut Lofland dan Lofland (1984) sebagaimana dikutip oleh Moleong (2001) bahwa sumber data dalam penelitian kualitatif ini berupa kata-kata dan tindakan yang diperoleh melalui hasil observasi dan *interview*.

b. Data Kuantitatif

Menurut Lofland dan Lofland (1984) sebagaimana dikutip oleh Moleong (2001) bahwa sumber data dalam penelitian kualitatif ini berupa dokumen-dokumen misalnya visi, misi, struktur atau sisila keluarga, peta, dan lain-lain.

2 Sumber Data

a. Data Primer

Data primer bersumber dari hasil wawancara terhadap responden tentang sistem matrilineal orang Boganatar.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan oleh peneliti sebagai bahan perbandingan dengan penelitian yang dilakukan meliputi foto, gambar, tabel, peta, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan judul penelitian.

1.5.5. Populasi dan Sampel

Dalam rangka pengumpulan data, maka perlu adanya responden sebagai sumber data terutama menyangkut data primer. Suharsimi Arikunto (1998:114) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber datadisebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.

Pengertian populasi menurut Hadari Nawawi (2001:141) adalah keseluruhan obyek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai-nilai tes atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian.

Sehubungan dengan pendapat di atas, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh seluruh masyarakat Boganatar. Berdasarkan populasi dalam penelitian ini, maka dapat sampelnya sebanyak 20 orang.

1.5.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Teknik Observasi

Observasi dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian yakni orang Boganatar. Melalui pengamatan, peneliti dapat mengungkap fakta terkait sistem matrilineal orang Boganatar. Agar pengamatan dapat berlangsung efektif, peneliti mendesain instrumen pengamatan yang menjadi pemandu untuk dapat menangkap peristiwa atau kejadian yang terjadi di wilayah Boganatar. Peneliti juga merekam kondisi yang terjadi di tempat penelitian dengan teknik dokumentasi melalui foto-foto penelitian.

2. Teknik Wawancara

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan informan sehubungan dengan masalah penelitian. Wawancara yang dilakukan pada informan menggunakan wawancara mendalam yang bertujuan untuk mengurai pokok persoalan mengenai sistem matrilineal orang Boganatar secara detail. Wawancara dilakukan dengan menyiapkan terlebih dahulu pokok-pokok wawancara sesuai dengan kompetensi informan.

3. Teknik Studi Dokumentasi

Peneliti melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen berupa buku teks, jurnal, naskah laporan hasil penelitian, arsip-arsip, pendapat serta peraturan perundang-undangan. Dokumen-dokumen ini akan diperoleh peneliti melalui ketekunan dalam membaca, media sosial, internet dan data/arsip

1.5.7. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu mendeskripsikan serta menganalisis data yang diperoleh di lokasi penelitian, kemudian diolah dan ditabulasi berdasarkan sifat dan jenisnya. Selanjutnya, diinterpretasi secara deskriptif untuk menjawab rumusan masalah. Miles dan Huberman (2007:16-20), mengemukakan bahwa analisis terdiri dari beberapa alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Berikut penjelasan dari alur kegiatan dari analisis sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Data collecting atau pengumpulan data yaitu pengumpulan data pertama atau data mentah yang dikumpulkan dalam suatu penelitian.

2. Reduksi Data

Data reduction atau penyederhanaan data adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dengan membuat abstraksi, mengubah data mentah menjadi yang dikumpulkan dari penelitian ke dalam catatan yang telah diperiksa. Tahap ini merupakan tahap analisis data yang mempertajam atau memusatkan, membuat sekaligus dapat dibuktikan.

3. Penyajian Data

Data Display atau penyajian data adalah menyusun informasi dengan cara tertentu, sehingga diperlukan penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Pengambilan data ini membantu untuk memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisa atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman.

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Conclutions drawing atau penarikan kesimpulan adalah merupakan langkah ketiga

meliputi makna yang telah disederhanakan, disajikan dalam pengujian data dengan cara mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan secara logis dan metodologis, konfigurasi yang memungkinkan diprediksi hubungan sebab akibat melalui hukum-hukum empiris.

1.5.8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Sifat keabsahan data dilihat dari obyektifitas dalam subyektifitas. Data obyektif diperoleh dari unsur subyektifitas obyek penelitian, yaitu bagaimana menginterpretasi realitas sosial terhadap fenomena-fenomena yang ada. Realitas sosial merupakan kondisi yang berubah-ubah melalui interaksi manusia dalam interaksi manusia dan fenomena ini bersifat sementara. Dalam hal inilah pandangan obyektif mampu mencari keabsahan data.

Langkah selanjutnya adalah dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu pengecekan kembali terhadap derajat kepercayaan data yang berasal dari wawancara dan selanjutnya peneliti membandingkan hasil wawancara dari informan yang berkaitan dengan tindakan sosial siswa dari keluarga miskin dalam mempertahankan eksistensinya (bandingkan dengan profil *informan*). Selanjutnya, mengecek kebenaran temuan atau data dengan konfirmasi kepada ahli atau pakar pada bidang yang diteliti. Tahapan berikutnya, pada tingkat keabsahan data melalui referensi yang sesuai dengan konteks penelitian, sebagai hasil pembandingan terhadap tulisan yang telah di susun, dapat di evaluasi dengan referensi berupa perlengkapan dokumentasi diantaranya berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah dan fokus penelitian, kamera foto digital, dan perlengkapan lainnya yang dapat memperlancar proses penelitian.

Tabel 1.1.

Teknik-Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Kriteria	Teknik Pemeriksaan
Kredibilitas/derajat kepercayaan	<p>a. Triangulasi: <i>Proses recheck</i> terhadap temuan dengan cara membandingkan dengan berbagai sumber, metode atau teori. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengajukan berbagai variasi pertanyaan, mengeceknya dengan berbagai sumber data, dan memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.</p>
Kebergantungan	<p>Audit kebergantungan: perbandingan teori dan atau penelitian yang berhubungan dengan sistem matrilinealnya serta <i>audit trial</i>.</p>
Kepastian	<p>Audit kepastian (perbandingan dan refleksi data)</p>